

TERAS

TIGO TUNGKU BAJARANGAN

Oleh:

Wisran Hadi

Bajaringan maksudnya dijarangkan (dijauhkan, dijarakan,) jarak dari setiap tungku diletakkan. Jadi, arti ungkapan dari judul ini adalah; ketiga tungku saling diperjauh letaknya, sesuai dengan apa yang telah dicanangkan Gubernur Sumbar, tigo tungku itu masing-masingnya diletakkan di Padang (kalau Masjid Agung Sumbar sempat didirikan), yang satu lagi di Bukittinggi (Perpustakaan Bung Hatta yang sudah diresmikan) dan satu lagi di Pagaruyung (Istano Basa yang akan didirikan kembali).

Tigo tungku sajarangan (bukan *bajaringan*, seperti judul di atas) atau dikenal pula dengan ungkapan *tigo tali sapilin* adalah tiga komunitas yang ada dalam masyarakat Minangkabau; alim ulama, ninik mamak dan cadiak pandai. Tigo tungku sajarangan itu bukanlah bagian dari undang-undang adat atau aturan adat, tetapi hanya semacam konsensus saja, kesepakatan antara para penghulu, alim ulama dan cadiak pandai agar selalu tetap bersatu. Sebab, kalau dikaji lebih dalam, dalam kelembagaan kepenghuluan secara adat sudah dipatrikan dan dikenal dengan sebutan *urang nan ampek jinih* yang terdiri dari; penghulu, manti, malin dan dubalang. Artinya, dalam institusi kepenghuluan itu sudah terangkum kesemua unsur; ninik mamak (penghulu), malin (alim ulama) dan manti (cadiak pandai) dan urang mudo atau paga nagari (dubalang). Jadi, dalam institusi kepenghuluan di dalam sebuah kaum, tidak ada lagi istilah *tigo tali sapilin* atau *tigo tungku sajarangan*. Jadi, jika kita mau mengikuti patron adat yang lama, tigo tungku sajarangan tidak dapat dimasukkan ke dalam format hukum adat. Tigo tungku sajarangan tak lebih dari sebuah retorika politik tradisional orang Minang, sebagaimana pula halnya dengan adagium Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.

Tahun beralih, musim berganti. Tigo tungku sajarangan kemudian dipopulerkan sebagai bagian dari adat Minangkabau. Dan penyimpangan itu diamini pula oleh mereka yang punya kepentingan-kepentingan tertentu. Lalu, dalam usaha Meminangkabaukan Sumatera Barat seperti yang dilakukan saat ini, ketiga institusi ini dianggap sebagai institusi penyangga kehidupan sosial masyarakat Sumatera Barat; ninik mamak (adat), alim ulama (agama) dan cadiak pandai (kekuasaan). Dalam konteks inilah kita mencoba mencermatinya.

Gubernur Sumatera Barat dalam beberapa kesempatan telah mencanangkan bahwa *tigo tungku sajarangan* itu kini adalah berpunca pada tiga kota; Padang sebagai representasi Alim Ulama dengan akan didirikannya sebuah masjid megah dan agung, Pagaruyung sebagai representasi Ninik Mamak dengan akan didirikannya kembali Istano Basa yang terbakar 27 Februari lalu, dan Bukittinggi sebagai representasi dari Cadiak Pandai dengan berdirinya Perpustakaan Bung Hatta di sana.

Ketiga-tiga kota itu dijadikan "simbol" atau ikon dari *tigo tungku sarangan*. Pemda Sumatera Barat beserta tokoh-tokoh masyarakatnya sudah berniat untuk; mendirikan Masjid Agung di Padang dan Istano Basa di Pagaruyung. Namun, tidak ada kerja atau usaha baik yang tidak ada ganjalannya.

Marilah kita simak terhadap salah satu ikon dari unsur Alim Ulama. Kota Padang dengan Masjid Agungnya. Kita akan terangguk-angguk heran setelah menyimak proses

akan didirikannya Masjid Agung itu. Dari berita pers yang kita ikuti, menurut rencana Gubernur akan mensegerakan berdirinya Masjid Agung Sumatera Barat itu, bahkan sempat kabar beredar akan diletakkan batu pertama sebelum tahun 2007. Ternyata sudah sampai bulan Maret 2007 belum ada tanda-tanda ke arah itu. Konon, beberapa orang anggota DPRD Sumatera Barat keberatan dengan design masjid Agung itu karena tidak ada kubah. Karena tidak ada kubah mengakibatkan proses pendirian Masjid Agung Sumatera Barat itu tersendat-sendat kalaulah tidak mau disebutkan sebagai penolakan dengan tameng tak ada kubah. Aneh memang, ada anggota DPRD Sumatera Barat yang ngotot agar masjid itu harus punya kubah. *Di surau ma baliau mangaji dulu?* Mereka yang sangat fanatik dengan kubah tapi tidak dengan masjidnya.

Jika cara seperti ini tetap dipertahankan, masyarakat akan menilai, bahwa kini semakin tajam perbedaan visi antara pemerintah dengan dewan perwakilan rakyatnya. Kita tetap berharap, mendirikan masjid adalah ibadah dan janganlah segala sesuatunya dijadikan komoditi politik untuk saling menjegal.

Persoalan Padang akan jadi ikon Alim Ulama dalam versi Gubernur tersebut juga mempunyai banyak masalah yang harus diselesaikan oleh Pemko, khusus Walikota. Berdirinya AW Café di mulut muara sungai berdiri diluar prosedur perizinan yang lazim (namun, jika hal itu terjadi pada rakyat kota Padang, mendirikan bangunan tanpa izin pasti Satpol PP akan segera membongkar bangunan itu). Jamaah Masjid Taqwa yang sebagian besar adalah pedagang Pasar Raya sudah lama kalimpasiangan dengan bisingnya suara angkot (penetapan angkot di sana adalah juga berdasarkan keputusan Pemko) dan akan ditambah dengan kebisingan bus yang sebentar lagi akan masuk kota pada titik-titik tertentu, (tapi lalu lintas di depan Plaza Andalas ditata begitu mulus).

Narkoba yang tidak kunjung tuntas pembasmiannya, menurut khabar terakhir, Padang adalah kota peringkat ke lima di Indonesia dalam kasus narkoba. Semua itu adalah batu-batu pengganjal untuk Padang dapat dijadikan ikon Alim Ulama. Apakah Gubernur menganggap dengan sebuah Masjid Agung saja, Padang dapat dijadikan ikon Alim Ulama? Dan apakah Alim Ulama sudah diberikan peran yang sesuai dalam pembinaan kota Padang yang akan dijadikan ikon itu?

Akan halnya kota Bukittinggi dapat dijadikan ikon, juga mempunyai permasalahan yang lebih urgen. Berdirinya sebuah perpustakaan tanpa didukung perguruan-perguruan tinggi yang akan memanfaatkan perpustakaan itu, apakah perpustakaan itu nanti tidak menjadi musium buku saja? Atau, apakah perpustakaan itu hanya untuk *lagak* kepada orang luar saja, sementara pembaca buku diperpustakaan itu hanya beberapa orang yang umumnya pelajar SLTA? Bukittinggi yang dijadikan ikon cadiak pandai tanpa ada tradisi keilmuan di sana, sama dengan Padang yang banyak maksiat akan dijadikan ikon Alim Ulama. Begitu juga dengan Pagaruyung sebagai ikon Ninik Mamak juga punya banyak persoalan yang harus diselesaikan, misalnya apakah LKAAM yang direncanakan akan berkantor di sana benar-benar represtatif, atau organisasi itu sesuai dengan aturan adat Minangkabau itu sebagai sebuah lembaga para penghulu?

Jika basis budaya Minang ini dulu diakui berpunca pada luhak nan tigo (Tanah Data, Agam dan Limopuluah Koto), dengan adagium adat; *adat manurun, syara' mandaki* – maksudnya perkembangan adat itu adalah dari luhak nan tigo sedangkan perkembangan syara' dari pantai (barat dan timur) lalu kini yang akan dijadikan punca

budayanya adalah Padang, Bukittinggi dan Pagaruyung. Nah, bagaimana dengan Payokumbuh sebagai Luhak Nan Bungsu serta Kubuang Tigo Baleh. Cukupkah orang-orang dikedua daerah basis budaya itu sebagai penjaja batiah dan penjual markisah saja?

Oleh karena itu, Pemko Padang apakah benar-benar sudah siap untuk menjadikan Padang ikon Alim Ulama hanya dengan didirikannya sebuah masjid agung saja? Sementara zakat masyarakat kota Padang dikumpulkan dengan gigihnya, jamaah Masjid Taqwanya tetap disiksa dengan segala kebisingan kotanya.

Apa yang diinginkan Gubernur Sumatera Barat sudah sangat jelas, tetapi aparat yang di bawahnya masih bersikap abu-abu, termasuk juga beberapa anggota dewannya. Gubernur mau *tigo tungku sajarangan*, sedang aparat di bawahnya menjalankan *tigo tungku bajaran*.**

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.